

## Jokowi Minta Ulama NU Bantu Sukseskan Vaksinasi Covid-19

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU) mendukung program vaksinasi Covid-19 nasional. Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan pada puncak peringatan hari lahir ke-98 NU, Sabtu (27/2) malam.

"Kami mohon dukungan para ulama dan keluarga besar NU untuk ikut membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi (Covid-19) nasional kita," ujar Jokowi dalam tayangan video yang disiarkan NU Channel, Sabtu (27/2) malam.

"Dan mohon bantuan untuk memberikan informasi (vaksinasi) yang akurat kepada umat. Apalagi sekarang ini PBNU telah memiliki TV NU

yang jaringannya sangat luas," katanya.

Menurut Jokowi, televisi milik NU itu dapat dijadikan sarana dakwah yang menyenangkan bagi seluruh umat dan masyarakat Indonesia. Selain itu, dapat memperkuat toleransi dan persaudaraan serta membangkitkan optimisme dalam menghadapi setiap tantangan.

Lebih lanjut kepala negara menjelaskan, Indonesia telah mampu bergerak cepat dalam mengupayakan ketersediaan vaksin Covid-19 bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui, saat ini vaksin Covid-19 sedang diperebutkan 215 negara di dunia. "Kita juga menjadi salah satu negara yang melakukan vaksinasi paling awal di Asia Tenggara," tandasnya. ● han

## Jadi Tersangka, Gubernur Sulsel Punya Kekayaan Rp51,35 Miliar

JAKARTA (IM) - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penerimaan suap terkait proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Nurdin yang ditangkap di rumah dinas di Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu (27/2) dini hari, diketahui memiliki kekayaan sebesar Rp 51,35 miliar berdasarkan data yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Dilihat dari elhkn. kpk.go.id, Sabtu (27/2), Nurdin terakhir kali melaporkan LHKPN pada 29 April 2020 untuk laporan periodik 2019. Tercatat dalam LHKPN, Nurdin mengaku memiliki 54 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng

hingga Kabupaten Soppeng. Adapun luas tanah dan bangunan milik mantan Bupati Bantaeng dua periode itu bervariasi mulai dari 44 meter persegi hingga yang terluas 18.166 meter persegi. Jika ditotal, puluhan tanah dan bangunan milik Nurdin diklaim senilai Rp 49.368.901.028.

Selain itu, Nurdin mengklaim hanya memiliki satu unit kendaraan, yakni mobil Toyota Alphard senilai sekitar Rp 300 juta. Lebih lanjut, Nurdin mengaku memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 271,3 juta serta harta berupa kas. Angka itu setara kas senilai Rp 267,4 juta.

Nurdin juga diketahui memiliki harta lainnya senilai Rp 1,15 miliar. Namun Nurdin mengklaim mempunyai utang sebesar Rp 1.250.000. Apabila ditotal, harta yang dimiliki Nurdin berjumlah Rp 51.356.362.656. ● mei

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## MENTERI SOSIAL DI SURABAYA

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kiri) menyerahkan bantuan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kanan) saat pemberian bantuan, di Balai Kota Surabaya, Jawa Timur, Minggu (28/2). Pemberian bantuan dari Kementerian Sosial kepada Pemkot Surabaya tersebut berupa handsanitizer sebanyak 448 karton dan masker medis sebanyak 25 karton.

## KPK LAKUKAN OTT GUBERNUR SULSEL

# Kuat Dugaan Ada Praktek `Ijon Politik` Dilakukan Gubernur Nurdin Abdullah

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga melakukan sistem `ijon politik` terhadap kolega yang notabene tim suksesnya dalam memuluskan sejumlah proyek.

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto yakin bahwa Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah merupakan sosok yang baik. Untuk itu, pihaknya akan memberikan bantuan hukum kepada Nurdin dalam menghadapi proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto mengatakan, pihaknya terus mengikuti perkembangan kasus yang menimpa kader politiknya itu. Tapi satu hal yang pasti, Nurdin orang baik yang dekat kalangan petani.

"Beliau adalah sosok yang mendalami ilmu-ilmu pertanian dan betul-betul mendedikasikan diri bagi kepentingan masyarakat. Sehingga kami sangat kaget atas kejadian tersebut," kata Hasto di sela kegiatan 'Gowes Bareng PDI Perjuangan' yang dimulai dari Monas, Jakarta, Minggu (28/2).

Dalam peristiwa ini, kata Hasto, partai politik, termasuk PDIP, memang tidak boleh intervensi hukum. Namun demikian, pihaknya merasa berhak melakukan berbagai hal pendampingan, termasuk bantuan hukum. Menurutnya, bantuan ini juga sambil menunggu keterangan secara

lengkap dari KPK berkaitan dengan kasus hukum Nurdin.

"Tetapi pada prinsipnya melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, agar partai memberikan advokasi. Untuk itu, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait hal tersebut," kata Hasto.

Saat ditanya masa jabatan Gubernur Nurdin yang tersisa tiga tahun, Hasto menegaskan pihaknya belum berpikir ke arah sana. Sebab, pihaknya mengaku masih syok dan kaget dengan kabar yang menimpa Nurdin. Hasto hanya mengaku Nurdin sosok yang baik, berdasarkan track recordnya selama ini.

"Karena beliau rekam jejaknya kan sangat baik. Apakah ini ada faktor x yang kami belum ketahui, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK," ucap Hasto. "Saya pikir itu suatu sikap yang berada dalam koridor

ketaatan kami pada proses hukum tanpa intervensi politik," ujarnya.

## Ijon Politik

Sementara Direktur Wahli Sulawesi Selatan (Sulsel) Muhammad Al Amin mengatakan, sebenarnya pihaknya telah melaporkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Terkait dengan advokasi tambang, kami bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil baik di level nasional dan daerah beserta masyarakat-masyarakat Kodingareng juga sudah menyampaikan laporan atau memberikan laporan terkait tindak dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan," kata Amin dalam webinar bertajuk Jejak Gubernur Nurdin Abdullah dalam Konflik Tambang di Kodingareng dan Makassar New Port, Minggu (28/2).

Pihaknya menduga ada sistem ijon politik yang dilakukan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, terkait kasus korupsi yang menimpanya.

"Kami menduga ada praktek ijon politik yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan terhadap kolega yang notabene merupakan tim suksesnya dalam memuluskan proyek atau mendapatkan tender pengadaan pasir laut di pulau Kodingareng," tambah.

Selain itu, ada dugaan monopoli usaha serta persaingan tidak sehat proyek tambang pasir laut itu.

Pelaksanaan sistem ijon yang dimaksudkan di sini memang hampir sama sebagaimana terjadi dalam fenomena rentenir, di mana pemodal meminjamkan kapitalnya pada pihak yang membutuhkan. Dikatakan meminjamkan karena memang bantuan tersebut akan ditarik kembali dalam jangka waktu tertentu. ● han



IDN/ANTARA

## FENOMENA BULAN PURNAMA SALJU

Bulan purnama terlihat di langit kawasan Depok, Jawa Barat, Minggu (28/2). Menurut Pusat Edukasi Sains Antariksa LAPAN, secara tradisional, bulan purnama di bulan Februari 2021 disebut juga Bulan Purnama Salju (Bulan Salju Penuh) karena di belahan utara Bumi, hujan salju turun di sisa musim dingin.

## BCA Bantah Laporkan Ardi Soal Kasus Salah Transfer Rp51 Juta

SURABAYA (IM) - PT Bank Central Asia (Tbk) atau BCA akhirnya membantah pihak yang melaporkan Ardi Pratama, warga Surabaya, ke polisi terkait salah transfer Rp51 juta.

Bantahan tersebut disampaikan oleh Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA, Hera F Haryn dalam rilis yang diberikan kepada wartawan, Sabtu (27/2).

Dalam rilis dijelaskan, pelaporan bukan dilakukan pihak BCA melainkan oleh mantan karyawan BCA dengan kesadarannya sendiri.

Inisiatif yang diambil pelapor (NK) dilakukan karena dana yang nyasar ke Ardi Pratama belum dikembalikan.

"BCA sebagai lembaga perbankan telah menjalankan operasional perbankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," urai Hera F Haryn.

Selain itu dalam poin rilis perihal terjadinya kesalahan transfer oleh bank, nasabah wajib mengembalikan uang tersebut. Sebab, penguasaan dana hasil transfer oleh seseorang yang diketahui bukan miliknya diancam hukuman pidana dan diatur dalam Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Pihak BCA juga membantah itikad baik Ardi yang hendak mengembalikan dengan cara diangsur, Justru BCA

mengaku telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah, namun versi BCA tidak ada itikad baik dari Ardi untuk mengembalikan dana hingga sampai Sabtu (27/2).

Justru BCA menegaskan bahwa catatan bank, nasabah telah menerima 2 (dua) kali surat pemberitahuan terjadinya salah transfer dari bank. Dan pihak bank telah meminta nasabah untuk segera mengembalikan dana tersebut sejak Maret 2020.

Ardi, seorang makelar mobil asal Surabaya, Jawa Timur, menjadi terdakwa kasus penggelapan uang BCA Cabang Citraland, Surabaya. Kini dia ditahan.

Kuasa hukum Ardi Pratama, R Hendrix Kurniawan menjelaskan, awal mula kasus yang menimpa kliennya itu terjadi pada 17 Maret 2020. Mulanya, pihak BCA melakukan setoran klining yang tersasar ke rekening Ardi. Pengiriman uang itu dilakukan oleh back office BCA berinisial NK.

NK mengaku salah menginput nomor rekening saat melakukan setoran, dua angka bagian belakang nomor rekening itu berbeda. Transfer klining dari BI sebesar Rp 51 juta masuk ke rekening Ardi.

Namun, Ardi mengira uang itu adalah komisi dari penjualan mobil yang dilakukannya. Uang itu akhirnya digunakan untuk keperluan belanja. "Dia makelar mobil, karena pas dicek itu tidak ada identitas pengirimnya, hanya klining BI. Akhirnya dipakailah uang itu untuk keperluannya seperti belanja dan bayar utang," ujar Hendrix saat dihubungi, Rabu (24/2). ● han

## Parpol Harus Dukung Tercapainya 30 % Keterwakilan Perempuan di Parlemen

JAKARTA (IM) - Jumlah perempuan Indonesia yang duduk di parlemen hanya sekitar 20,5 persen. Jumlah itu masih jauh dari angka keterwakilan perempuan di parlemen dari negara Filipina ataupun Timor Leste.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Netty Prasetyani mengatakan, agar tercapai keterwakilan perempuan Indonesia 30% di parlemen membutuhkan dukungan semua pihak, terutama dukungan dari partai politik.

"Pada hari ini kita butuh support system, baik dari lingkungan keluarga termasuk juga lingkungan organisasi, dalam hal ini dalam perempuan politik berarti partai politik. Tentu saja dalam scoop yang lebih luas dalam membangun ekosistem sisterhood, membangun semangat kebersamaan, semangat kolaborasi," ungkap Netty dalam Audiensi Virtual Kaukus Perempuan Politik In-

donesia National Meeting, Minggu (28/2).

Netty memiliki sudut pandang bahwa ketika berbicara perempuan di dalam kancah perpolitikan atau parlemen, keterwakilannya adalah sebuah ruang, state atau panggung. Sehingga, keterwakilan perempuan di dalam kancah perpolitikan atau keterwakilannya dalam parlemen tidak boleh kosong.

"Sudut pandang berbeda maksud saya, mungkin berangkat dari pengalaman empirik saja ya. Jadi kalau kita bicara tentang perempuan dan kepemimpinan, perempuan dan keterwakilan, saya harus mengatakan bahwa keterwakilan dan kepemimpinannya dalam sebuah ruang, sebuah state, sebuah panggung. Tentu saja ruang atau panggung ini nggak boleh kosong tapi harus diisi," tegas Netty.

Netty pun mengatakan bahwa perempuan juga harus menginisiasi dengan sebuah

atribut sosial, bukan hanya mengandalkan atribut sosial tanpa isi. "Kenapa? Karena kita nggak mungkin kita hanya bisa mengandalkan sebuah atribut sosial tanpa isi. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang bagaimana kepemimpinan ini maka mau nggak mau hari ini kita harus menjawabnya, mengisinya dengan konten nilai-nilai penting bagi seorang perempuan," katanya.

Menurutnya, politik tidak sepenuhnya berurusan dalam kekuasaan, namun juga seperangkat etika untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Karena saya meyakini sepenuhnya bahwa politik is not only tools to power, but it is set to etic to serve. Bahwa politik bukan cuma sekedar jalan dalam "merebut sebuah kekuasaan" tapi politik adalah seperangkat etika untuk bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," tegasnya. ● han



## GOWES BARENG PDI PERJUANGAN

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) bersepeda di Kawasan Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (28/2). DPP PDIP Perjuangan menggelar kegiatan "Gowes Bareng PDI Perjuangan" sebagai rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-48 PDIP sekaligus untuk mengkampanyekan gerakan politik hijau.

## Sang `Algojo` Koruptor Mantan Artidjo Alkostar Meninggal

JAKARTA (IM) - Artidjo Alkostar, pendekar hukum di Indonesia, meninggal dunia. Pria yang dikenal tegas sehingga dijuluki algojo oleh para koruptor karena ketegasannya yang tak pandang bulu.

Kabar duka meninggalnya Artidjo disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD di akun Twitter-nya, @mohmahfudmd. Artidjo mengembuskan napas terakhir pada Minggu 28 Februari 2021 siang.

"Kita ditinggalkan lagi oleh seorang tokoh penegak hukum yang penuh integritas," tulis Mahfud.

Jabatan terakhir Artidjo adalah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Dia dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 Desember 2019.

Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, Artidjo lahir di Situbondo, Jawa Timur, pada 22 Mei 1948 dan meninggal di usia 72 tahun. Dia menempuh pendidikan SMA di Asem Bagus, Situbondo. Setelah lulus, dia kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).

Gelas magister (LLM) didapatnya di Universitas Northwestern, Chicago. Selain itu, dia juga menempuh pelatihan pengacara hak asasi manusia di

Universitas Columbia selama enam bulan.

Sementara itu, kiprah Artidjo di bidang hukum dimulai pada tahun 1976 dengan menjadi tenaga pengajar di FH UII Yogyakarta. Pada 1981, ia menjadi bagian dari Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, masing-masing menjadi wakil direktur (1981-1983) dan direktur (1983-1989).

Dalam rentang waktu yang sama, Artidjo bekerja selama dua tahun di Human Right Watch divisi Asia di New York. Dia juga mendirikan kantor hukum Artidjo Alkostar and Associates hingga 2000. Selanjutnya, pada tahun 2000 ia terpilih sebagai Hakim Agung Republik Indonesia.

Saat menjabat Hakim Agung, Artidjo mendapat banyak sorotan atas keputusan dan pernyataan perbedaan pendapatnya dalam banyak kasus besar.

Nama Artidjo populer saat memperoleh vonis 4 tahun penjara menjadi 12 tahun kepada politikus Angelina Sondakh untuk kasus korupsi, serta vonis 10 bulan kepada dokter Ayu untuk kasus malapraktik.

Sebelum ditunjuk sebagai Dewas KPK, Artidjo menjabat sebagai Ketua Muda Kamar Pidana Mahkamah Agung Indonesia. ● mei

## PENGUMUMAN PT DINAMIKA USAHA PROPERTINDO (Perseroan)

Direksi Perseroan mengumumkan bahwa telah terjadi hal-hal sebagai berikut: Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Dinamika Usaha Perumahan, berkedudukan di Jakarta Selatan, Nomor 75, tanggal 25 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, telah disetujui di antaranya mengenai peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan dengan cara pengalihan saham baru yang diambil bagian oleh:

1. PT Djasa Ubersakti Properti sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar saham atau senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah);
2. PT Eka Nusa Kreasindo sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) lembar saham atau senilai Rp 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta Rupiah);

dimana kewajiban penyeteroran atas pengambilan bagian saham baru tersebut dilakukan dengan cara mengkompensasikan hak tagih atas utang Perseroan kepada PT Djasa Ubersakti Properti dan PT Eka Nusa Kreasindo.

Pelaksanaan kompensasi hak tagih atas utang Perseroan tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0128155 tanggal 26 Februari 2021.

Pengumuman ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

Jakarta Selatan, 01 Maret 2021  
DIREKSI PT DINAMIKA USAHA PROPERTINDO